



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Juli 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUB UNIT KERJA : BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAFARUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
3. NHK : 496974

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.022.860.000

1. Tanah Seluas 146 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 292.000.000
2. Bangunan Seluas 31.23 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 472.860.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/145 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 288.000.000
5. Tanah Seluas 875 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI
Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 209.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINI BUS Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 SEPEDA MOTOR Tahun 2017,
HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, NMAX KENDERAAN RODA DUA Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.211.387.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	3.443.247.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.443.247.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.